

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Socpomo, *BAR-BAB TENTANG HUKUM ADAT*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- R. Soetojo Prawirohanidjojo, *PLURALISME DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- R. Soetojo Prawirohanidjojo dan Martalena Pohan, *HUKUM ORANG DAN KELUARGA*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Teer Haar, *ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Tobing. Lumbang. G.H.S, *PERATURAN JABATAN NOTARIS*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Wirjono Projodikoro, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Yan Pramadya Puspa, *KAMUS HUKUM BELANDA-INDONESIA-INGGRIS*, Aneka Ilmu, Semarang, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

- Staatblad tahun 1917 nomor 129 dan Staatblad 1924 nomor 557 tentang Adopsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pradnya Pramita, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak, Lembaran negara 1979 Nomor 32, Tambahan nomor 3143.
- Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 Nopember 1959 mengenai "Declaration of the Right of the Child"

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647.

Peraturan jabatan notaris di Indonesia (Ord. Stb) 1860 Nomor 3 mulai berlaku 1 Juli 1860)

Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tanggal 27 Maret 1980 Nomor B-112/Menko/Polkam/3/1980 perihal larangan pengangkatan anak WNI - WNA.

Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor: JHA 1/1/2 Tanggal 24 Februari 1978 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing.

Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1978 No. Huk. 3-I-58-78 Perihal Petunjuk Sementara dalam Pengangkatan Anak (Adopsi) Internasional

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Peyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak

Makalah / Majalah:

Bagio Atmadja, KULIAH PERATURAN JABATAN NOTARIS MAGISTER KENOTARIATAN, Fakultas Hukum Unair. Surabaya, 2000

Barda N. Arif, Makalah PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK, 5 Oktober 1996.

Muh. Ridwan Indra R.A., Materi Kuliah Jabatan Peraturan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unair. Surabaya.

Dalam seminar Perlindungan Anak Pra Yuwana Pusat, 7 s/d 9 Juni 1982, Jakarta.

Makalah Hukum Pembangunan No. 2 tahun ke-X. Maret 1980.

Jurnal Magister Hukum vol. 2 No. 1 Februari 2000.

Putusan-putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 7/PN.END/1981/Pdt/D tanggal 29 Juli 1981.

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 191/1979.Pdt.P tanggal 14 Nopember 1979.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/PDT/G/1992/PN/THAN tanggal 03 Oktober 1992.

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta 907/1963 P tanggal 29 Mei 1963 tentang Adopsi Anak Perempuan (Hakim Penggali Hukum Pengujian Produk Perundang-undangan Kolonial).

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 73/1976 tanggal 23 September 1976

Lain-lain:

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 1995 Tentang Peradilan Anak.

Rancangan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 1995.

Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR-RI terhadap Rancangan UU Peradilan Anak.